

ANALISIS LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

ATAS KEPATUHAN, TRANSPARANSI

DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

(Studi Kasus Pemilihan Umum Legislatif 2014 di KPU Kabupaten Sidoarjo)



Oleh :

FRENQUI MONTEIRO

NIM : 01112002

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

DAFTAR ISI

SURATPERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJIAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
Abstrak	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TEBEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB IPENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakan Penelitian.....	2
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan	10
2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan.....	11
2.2.3. Karakteristik Laporan Keuangan	20
2.2.4. Unsur – Unsur Laporan Keuangan	27
2.3. Kepatuhan Laporan Keuangan	29
2.4. Transparansi dan Akuntabilitas	42
2.5. Laporan Dana Kampanye Partai Politik	49

2.5.1. Penerimaan Dana Kampanye	54
2.5.2. Penggunaan Dana Kampanye	59
2.5.3. Pelaporan Dana Kampanye	61
2.6. Tujuan Pelaporan Dana Kampanye	62
2.7. Manfaat Pelaporan Dana Kampanye	65
2.8. Tranparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye	67
2.9. Kerangka Berpikir	70

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	71
3.2 Sumber Data	72
3.3 Objek Penelitian (Situasi Sosial)	73
3.4 Metode Pengumpulan Data	74
3.5 Teknik Analisis Data	75

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	79
4.1.1. Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo	79
4.1.2. Hasil Perolehan Data Sekunder atas Kepatuhan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Partai Politik pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo	81
4.1.2.1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	84
4.1.2.2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	87
4.1.2.3. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	91
4.1.2.4. Partai Amanat Nasional (PAN)	93
4.1.2.5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)	95
4.1.2.6. Partai Demokrat (PD)	97
4.1.2.7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	100
4.1.2.8. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	103
4.1.2.9. Partai Bulan Bintang (PBB)	104

4.1.2.10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	106
4.1.2.11.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	108
4.1.2.12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	111
4.1.3.	Rangkuman Hasil Audit Kepatuhan oleh Delapan (8) KAP atas Laporan Dana Kampanye Dua Belas (12) Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo.	113
4.1.4.	Hasil Perolehan Data Primer (<i>Script</i> Wawancara) Melalui Wawancara Mendalam dengan Informen dari KPU, KAP dan Pakar Hukum Tata Negara dengan Pembahasannya.	114
4.1.4.1.	Catatan Wawancara Mendalam Bersama Informan Moch. Zainal Abidin Sebagai Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo.	113
4.1.4.2.	Catatan Hasil Wawancara Mendalam Bersama Informan; Habib Basuni, CPA Selaku Auditor Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo.	123
4.1.4.3.	Catatan Hasil Wawancara Mendalam Bersama Informan, Pak Rusdianto Sesum, S.H., M.H Selaku Pakar Hukum Tata Negara dan Staff Ahli DPRD Jatim dan DPRD Se-Jatim.	132
4.1.5.	Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik Peserta Pemilu atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo	152
4.1.6.	Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye	159
4.1.7.	Kendala Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye	163
4.1.8.	Rekomendasi Solusi untuk Meningkatkan tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Parpol	167
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		171
5.1.	Kesimpulan	171
5.2.	Saran	173
DAFTAR PUSTAKA		176

Abstrak

Analisis Laporan Dana Kampanye Partai Politik atas Kepatuhan, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye

(Studi Kasus pada Pileg 2014 di KPU Kabupaten Sidoarjo)

Oleh : Frenqui Monteiro

Dana kampanye merupakan pengeluaran terbesar parpol dari semua pengeluaran. Atas besaran dana yang diperoleh dan digunakan selama masa kampanye maka, melalui penelitian ini ingin mengetahui dan memahami apakah para caleg dan parpol membuat laporan yang patuh terhadap UU dan peraturan, transparan dan akuntabel atas semua transaksinya kepada publik karena semuanya merupakan syarat untuk menciptakan *good governance* di negara demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis triangulasi untuk mengumpulkan data, menganalisa data dan melakukan *in-depth interview* dalam situasi sosial di KPU kabupaten Sidoarjo, akuntan publik KAP Habib Basuni, CPA dan pakar hukum tata negara.

Penelitian ini menemukan bahwa parpol tidak patuh, transparan dan akuntabel karena: *cost politic* masih tinggi, sistem demokrasi belum *settle* untuk mengatur dana kampanye, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan politik masyarakat, lemahnya administrasi internal partai dan karena tidak ada korelasi antara kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye dengan suksesi di pemilihan. Oleh karena itu perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap semua pelaku demokrasi agar tercapai *good governance*.

Key words: Kepatuhan, transparansi, akuntabilitas dan *good governance*.

Abstract

Critical Analysis Onto Political Party Campaigning Fund Base on Lawfulness, Transparency and Accountability in Political Campaigning Contribution and Its Usefulness During the Campaigning.

(Case Study in 2014 Legislative Election in the KPU Sidoarjo)

Author : Frenqui Monteiro

Campaign fund is the biggest spending of political party. Due to the huge amount of money during the campaign, by conducting this research to know and understand does the legislative candidate and political party are lawful, transparent and accountable to their spending to the public as principle of good governance in democratic country.

This is a qualitative research method with triangulation in collecting data, analysing, conduct indepth interview where social situation in the office of Sidoarjo KPU, Habib Basuni, CPA public accountant; and the expert of government/ constitutional law.

Finding shows that, twelve (12) political party are unlawful to their campaign fund report, yet not transparent and accountable to the public because of: high political cost, unsettle of democratic system, weak of law enforcement, lack of political education, unprofessional of political party internal administration and irrelevancy of transparency and accountability towards political succession. Therefore, need to have holistic approach to all part of democratic stakeholders to play their roles to achieve good governance.

Key words: lawfulness, good governance, transparency and accountability.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian panjang melalui literatur review, analisis data dan temuan dilapangan atas kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Dan mengingat permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan tingkat kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye sebagai berikut:

1. Berdasarkan *review* dan analisis terhadap dokumen hasil audit atas laporan dana kampanye dua belas (12) partai politik oleh delapan (8) KAP yang telah mengaudit dana kampanye perpol peserta pileg 2014 di kabupaten sidoarjo atas patokan UU No.8 tahun 2012 yang di ubah menjadi UU No.1 tahun 2014 dan PKPU No.17 tahun 2013 menunjukan bahwa parpol peserta pileg 2014 di kabupaten Sidoarjo, secara umum sudah patuh tapi secara khusus belum patuh dengan beberapa alasan dan fakta diantaranya: parpol belum menempatkan semua penerimaan dana kampanye berupa uang di dalam RKDKP dan semua pengeluaran dana kampanye melalui RKDKP sehingga tidak tercatat dalam rekening korang masing-masing parpol; kebanyakan laporan DK-1 parpol s/d DK-3 parpol masih diisi nihil; masih ada penyumbang perseorangan yang tidak mengisi surat pernyataan penyumbang; waktu pelaporan masih belum sesuai dengan UU dan PKPU serta cakupan laporan awal yaitu termasuk saldo awal RKDKP yang tidak jelas sumbernya; nama bank dan nama pemilik RKDKP belum sesuai UU dan peraturan; formulir penyumbang

individo, kelompok dan badan usaha non pemerintah masih dilaporkan dalam bentuk nihil yang artinya tidak sumbangan baik dari individu, kelompok maupun badan usaha non-pemerintah. Pertanyaan peneliti, apakah benar parpol dan/atau caleg mampu mendanai kegiatan kampanye yang berkisaran ratusan juta sampai miliaran rupiah dengan modalnya sendiri? Kalau memang benar. Berapa gaji perbulan yang diterima agar menutup semua pengeluaran selama di masa kampanye?;

2. Berdasarkan prinsip transparansi dalam kerangka berpikir menunjukan bahawa: laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye partai politik belum transparan karena beberapa faktor diantaranya; parpol peserta pemilu tidak membuka semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye, tidak membuka daftar penumbang dalam formulir laporan yang disediakan oleh KPU, tidak mencatat semua penerimaan dan penggunaan dana baik dalam rekening koran rekening khusus dana kampanye maupun dalam daftar laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye partai politik dan formulir laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye berupa DK1-parpol s/d DK13-parpol dilaporkan tapi dalam bentuk nihil. Sehingga laporan tersebut tidak mempunyai relevansi dan bernilai ekonomi;
3. Atas prinsip akuntabilitas, peneliti menyimpulkan bahawa: laporan dana kampanye partai politik peserta pemilu belum akuntabel. Karena: penyumbang individu tidak mengisi surat pernyataan penyumbang; sangat tidak rasional jika semua pengeluaran dana kampanye didanai dengan dan pribadi parpol dan/atau caleg tanpa bantuan dari individo, kelompok maupun badan usaha non-pemerintah di Indonesia

khususnya kabupaten Sidoarjo dan tidak etis jika penyumbang dana kampanye tidak mencantumkan identitas lengkap sebagai penyangga baik individu, kelompok dan badan usaha non-pemerintah.

Singkatanya, peneliti menyimpulkan bahawa laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye partai politik peserta pileg 2014 dikabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan standar kepatuhan, prinsip transparansi serta akuntabilitas sehingga dikatakan tidak patuh, transparan maupun akuntabel.



DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Pemiliha Umum (KPU). 2013. Propinsi Jawa Timur. *Peraturan penyelenggara kampanye partai politik di Indonesia.*
- Komisi pemilihan umum (KPU). *Rincian perolehan suara sah setiap partai politik dan calong anggota DPRD kabupaten/kota serta perolehan suara sah calong anggota DPRD kabupaten/kota dalam pemilu tahun 2014.* Kabupaten sidoarjo, daerah pemilihan Sidoarjo I s/d Sidoarjo IV. Propinsi Jawa Timur.
- Komisi pemilihan umum (KPU). *Rekapitulasi perolehan kursi partai politik dalam pemilihan anggota DPRD 2014,* kabupaten Sidoarjo, propinsi Jawa Timur.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Per 1 Juli (2015).* Salemba Empat.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No.17/2013 *Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia (UU No.8/2012) tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* Supriyanto. Didik dan Lia Wulandari. *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan.* Yayasan Perludem.

- Wahyudin. 2013. *Makalah Akuntansi Sektor Publik Akuntabilitas Keuangan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Studi Awal*. Yogyakarta. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Supriyanto dan Wulandari.2013. *Basa-basi Dana Kampanye Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Yayasan Perludem.
- Junaidi. V. Dkk. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Harjanto.Nico. 2013. *Dana Kampanye dan Karakteristik Organisasi Partai Politik*
- Irawan. Ade.,dkk. 2014.*Panduan pemantauan korupsi pemilu*.
- Badoh. Ibrahim Fahmi dan Abdulah Dhalan.03 Desember 2010. *Korupsi Pemilu di Indonesia*.
- Bryan. Shari dan Denise Baer. *Money in Politics; A study of Party Financing Practices in 22 countries*.
- Johnston. Michael. *Political Parties And Democracy In Theoretical And Practical Perspectives; Political Finance Policy, Parties, And Democratic Development*.
- Doublet.Yves-Marie. *Fighting Corruption Political Funding, Thematic Review Of Greco's Third*.
- Tham. Joo-Cheong. 2010. *Regulating Political Contributions Another View from Across the Tasman Evaluation*.
- Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT.Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.

Suwarjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*, Edisi ketiga.

BPFE-Yogyakarta, Jogjakarta.

Pakde Karwo. 2015. *Administrative Reform: Birokrasi itu Melayani*. Prenadamedia Group.

Supriyanto dan Wulandari. 2012. *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besar, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Yayasan Perludem.

Referensi website : <http://www.transparency-initiative.org/about/definitions> diakses pada tanggal 22 Mei 2016 jam 16.00 di Coffee Toffee Klampis Jaya Surabaya.

Referensi website : <http://kbbi.co.id/arti-kata/analisis> diakses pada tanggal 23 Mei 2016 Jam 15.09 di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPERSIP) propinsi Jawa Timur.

Referensi website : <http://kpud-sidoarjokab.go.id/index.php/profil-kpu-sidoarjo/anggota-kpu/anggota-kpu-kabupaten-sidoarjo-periode-2014-sd-2019>di akses pada tanggal 5 agustus 2016 di CK Klampis Jaya, Surabaya.